



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 12A TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER**  
**KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2018-2022 dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor I A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2018;
9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 - 2022.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bangka.

4. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Bangka yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
7. Rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Focal Point PUG adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
11. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2018-2022 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah/ unit kerja; dan
- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantuan dan evaluasi.

#### **Pasal 3**

RAD PUG Tahun 2018-2022 bertujuan untuk menetapkan pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender agar pelaksanaan tugas dan fungsi Pokja PUG dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah.

#### **Pasal 4**

- (1) RAD PUG Tahun 2018-2022 meliputi penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, sosialisasi pengarusutamaan gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan optimalisasi pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- (2) RAD-PUG 2018-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian pengarusutamaan gender pada Tahun 2018- 2022 oleh Pemerintah Daerah.

### **BAB III SISTEMATIKA**

#### **Pasal 5**

- (1) RAD PUG Tahun 2018-2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai aksi PUG;
  - b. penanggung jawab, yang memuat organisasi perangkat daerah dan/atau kelompok kerja yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab langsung terhadap pencapaian dari target aksi tersebut;
  - c. instansi terkait, yang memuat instansi/ kelompok kerja/ tim yang terkait dalam mendukung dan mengoordinasikan terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;
  - d. kriteria keberhasilan, yang memuat manfaat yang harus diperoleh dari keluaran yang dihasilkan (*outcome*) dari pelaksanaan aksi tersebut;
  - e. ukuran keberhasilan, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dan diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya dalam pelaksanaan aksi tersebut; dan
  - f. keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) Contoh format RAD PUG Tahun 2018-2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 6**

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan Daerah dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PUG Tahun 2018-2022.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 5 Februari 2018

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 5 Februari 2018

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**AKHMAD MUKHSIN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 50**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA  
NOMOR 12A TAHUN 2018  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN  
GENDER KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018-2022**

**RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018-2022**

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN					KET
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5						6
<b>PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG</b>										
Terbentuk wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Kab. Bangka										
- Penetapan Rencana Kerja Tahunan Pokja PUG	Pokja PUG	Dinas P2KBP3A BAPPEDA	Terwujudnya pola kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	✓	✓	✓	✓	✓	
- Reviu Pembentukan dan Penetapan Focal Point PUG diseluruh OPD	Pokja PUG	Dinas P2KBP3A BAPPEDA	Terbentuknya Focal Point di seluruh OPD	Adanya SK Tim Focal Point Di seluruh OPD	✓					
- Penyusunan Rancangan RAD – PUG Tahun 2018-2022	Pokja PUG Kab	Dinas P2KBP3A BAPPEDA	Tersusunnya draf Perbup RAD-PUG Tahun 2018-2022	Adanya Perbup RAD-PUG Tahun 2018-2022	✓					
- Rapat koordinasi Pokja PUG Kabupaten	DP2KBP3A	DP2KBP3A	Terlaksananya kegiatan Rapat koordinasi Pokja PUG	Terlaksananya kegiatan Pokja PUG dan terselesainya masalah tentang PUG	✓	✓	✓	✓	✓	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN					KET
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5						6
- Pembentukan Forum PUSPA ( Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak				Tergalangnya partisipasi lembaga masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan Perlindungan Perempuan dan Anak	✓					
<b>SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>										
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah										
- Sosialisasi dan bimbingan Teknis Pengarusutamaan gender Pokja PUG, Focal point di semua OPD di Kab Bangka	Dinas P2KBP3A	OPD Kabupaten Bangka	Pokja PUG, Focal Point di OPD Kabupaten Bangka memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.	Terlaksananya sosialisasi dan bimbingan teknis Penguatan PUG	✓		✓		✓	
- Workshop PPRG			Pelaksanaan workshop PPRG bagi Kasubbag Perencanaan seluruh OPD	Adanya Dokumen RKA yang dianalisis GBS dan GAP di seluruh OPD		✓				

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN					KET
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5						6
- Pembinaan ke Kecamatan tentang PUG PPRG	Dinas P2KBP3A BAPPEDA	Kecamatan Kab. Bangka	Pelaksanaan Pembinaan bagi Perencana di Kecamatan di Kab. Bangka	Adanya Dokumen RKA yang di analisis GBS dan GAP di seluruh Kecamatan Kab. Bangka		✓	✓			
<b>IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)</b>										
- Pembentukan Tim Teknis	Pokja PUG kab.	BAPPEDA dan DP2KBP3A Kab. Bangka	Terwujudnya pelaksanaan PPRG di Kabupaten Bangka	- Terbentuknya Tim Teknis dan Sekretariat PPRG - Di tetapkannya tim teknis PPRG dengan Keputusan Ketua Pokja PUG - Sosialisasi pelaksanaan tugas Tim Teknis Kab. Bangka	✓					
- Penetapan pedoman dan petunjuk pelaksanaan PPRG	Tim Teknis PPRG	- Bappeda Kabupaten Bangka - DP2KBP3A Kab. Bangka - Inspektora t Kab. Bangka - BPKAD Kab. Bangka	Pengintegrasian gender dlm program Pembangunan daerah	Di tetapkannya Perbup Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPRG Kab Bangka Tahun 2018		✓				

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN					KET
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5						6
- Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget statement (GBS) pada RKA/DPA OPD	Tim Teknis PPRG	- Bappeda Kabupaten Bangka - DP2KBP3A Kab. Bangka - Inspektora t Kab. Bangka - BPKAD Kab. Bangka	Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan di Kab Bangka	- Fasilitasi penguatan PUG dan PPRG - Adanya program/ kegiatan yang telah di analisis dg GBS dan GAP - Publikasi GAP dan GBS pada RKA/DPA SKPD pada Website Pemda	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>PENINGKATAN SISTEM DATA DAN INFORMASI GENDER</b>										
- Penyusunan pedoman pengumpulan data terpilah gender	Pokja PUG	BAPPEDA dan DP2KBP3A	Terbentuknya draf SK tentang data terpilah	Adanya SK tentang data terpilah	✓					
- Penyusunan Profil gender Tingkat Kabupaten	Dinas P2KBP3A	BAPPEDA, BPS dan Seluruh OPD	Tersediannya data terpilah yang di butuhkan utk pembuatan profil gender.	Terbentuknya profil gender Kabupaten	✓	✓	✓	✓	✓	
- Publikasi Profil Gender Kabupaten Bangka	Dinas P2KBP3A	Tim penyusun Buku DataTerpilah Kab. Bangka	Terpublikasikan Profil Gender Kabupaten Bangka	Tersediannya informasi/data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	✓	✓	✓	✓	✓	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN					KET
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5						6
- Bimbingan Teknis penyusunan profil gender bagi seluruh aparat perencana OPD	Pokja PUG	BAPPEDA DP2KBP3A	Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan profil gender	Adanya data terpilah di masing-masing OPD yang di perlukan untuk pembuatan profil gender Kabupaten			✓			
- Pembuatan website Pokja PUG	Pokja PUG	DP2KBP3A, Dinkominfotik dan BAPPEDA	Terbuatnya website PUG	Terbuatnya website Pokja PUG	✓					
<b>OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER</b>										
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian gender dalam program pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran										
- Pemantauan pelaksanaan PUG di Kabupaten Bangka	Kelompok Kerja PUG	Bappeda Kab. Bangka dan DP2KBP3A kab. Bangka	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kab. Bangka sebagai bahan perumusan kebijakan		✓	✓	✓	✓	
<b>PENANGANAN ISU STRATEGI GENDER</b>										
- Pemetaan Industri rumahan	DP2KBP3A (Pemberdayaan Perempuan)	DP2KBP3A	Terlaksananya kegiatan pemetaan industri rumahan di seluruh Kecamatan.	Adanya data jumlah Industri Rumahan.		✓				

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN					KET
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5						6
- Pembinaan Industri Rumahan	DP2KBP3A	DP2KBP3A dan DINPMP2KU KM	Terlaksananya kegiatan pembinaan industri rumahan di Kab Bangka.	Adanya pemecahan permasalahan yang di hadapi oleh industri rumahan.		✓	✓	✓	✓	
- Sosialisasi penghapusan KDRT perempuan dan anak.	DP2KBP3A (PP dan PA)	DP2KBP3A, DINSOSPEM DES, Yayasan Nurdewi Lestari	Terlaksananya sosialisasi KDRT perempuan dan anak di 8 Kecamatan.	Menurunnya angka kekerasan pada perempuan dan anak	✓					
- Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak	DP2KBP3A (PP dan PA)	DP2KBP3A	Terlaksananya Kegiatan sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Adanya data pencatatan dan pelaporan KDRT perempuan dan anak	✓					
- Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	DP2KBP3A (PP dan PA)	PP & PA Dinas P2KBP3A Polres Bangka Dinsos pemdes Yayasan Nurdewi Lestari	Adanya Wadah untuk penanganan kasus KDRT perempuan dan Anak	Tertanganinya kasus KDRT perempuan dan anak	✓	✓				

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN					KET
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5						6
- Pembentukan forum PKDRT tk desa	DP2KBP3A (PP dan PA)	DP2KBP3A PKK	Terbentuknya forum PKDRT di Tk. desa	Tertanganinya masalah KDRT bagi perempuan dan anak di desa secara cepat	✓	✓	✓	✓	✓	
- Pendampingan perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	DP2KBP3A (PP dan PA)	PP & PA Dinas P2KBP3A Polres Bangka Dinsos pemdes Yayasan Nurdewi Lestari	Melaksanakan pendampingan terhadap perempuan dan anak yg mengalami KDRT	Melakukan pendampingan terhadap korban KDRT sampai tuntas	✓	✓	✓	✓	✓	
- Lomba implementasi nilai-nilai kejuangan perempuan Indonesia	DP2KBP3A (PP dan PA)	DP2KBP3A PKK	Terlaksananya lomba nilai-nilai perempuan Indonesia	Dapat lomba perempuan - perempuan yang menginspirasi	✓	✓	✓	✓	✓	
- Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	DP2KBP3A (seksi KB)	DP2KBP3A Dinkes	Terlaksananya pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	Pelayanan keluarga berencana gratis bagi keluarga miskin	✓	✓	✓	✓	✓	
- Penyuluhan, pembinaan dan pelayanan Akseptor keluarga berencana	DP2KBP3A (seksi KB)	DP2KBP3A Dinkes	Terlaksananya penyuluhan, pembinaan dan pelayanan akseptor KB	Meningkatnya cakupan peserta akseptor keluarga berencana	✓	✓	✓	✓	✓	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TAHUN PELAKSANAAN					KET
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5						6
- Sosialisasi dan fasilitasi Medis Operasi Pria (MOP)	DP2KBP3A (seksi KB)	DP2KBP3A Dinkes	Terlaksananya sosialisasi MOP dan terfasilitasinya peserta MOP	Tercapainya target yang menjadi akseptor KB MOP	✓	✓	✓	✓	✓	
- Pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	DP2KBP3A (seksi KB)	DP2KBP3A Dinkes	Terbentuknya Kampung KB di setiap Kecamatan	Pertahun 8 Kampung KB	✓	✓	✓	✓	✓	
- Pendataan Keluarga	DP2KBP3A (seksi KB)	DP2KBP3A Dinkes	Terlaksananya pendataan keluarga	Adanya data informasi keluarga kabupaten Bangka	✓	✓	✓	✓	✓	
- Sosialisasi Pendidikan kependudukan di SMA sederajat	DP2KBP3A (seksi KB)	DP2KBP3A Dinkes	Terlaksananya sosialisasi Pendidikan di SMA sederajat	Meningkatkan pengetahuan tentang kependudukan di sekolah	✓	✓	✓	✓	✓	
- Peningkatan program dalam kegiatan HARGANAS	DP2KBP3A (KS)	DP2KBP3A (KS)	Adanya laporan, dokumentasi dan data Profil juara serta lomba hari keluarga	Terlaksananya kegiatan lomba hari keluarga tingkat provinsi	✓	✓	✓	✓	✓	

**BUPATI BANGKA**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**